

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan sering kali belum dirasakan merata dan masih terdapat ketimpangan antar daerah.

Menurut Paul P. Streeten (dalam **Todaro**, 2004:126) menyatakan bahwa konsep pembangunan harus didefinisikan sebagai upaya untuk menghapuskan berbagai penyakit umat manusia : mal nutrisi (kekurangan gizi), penyakit, buta huruf, daerah-daerah pemukiman kumuh, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Makna lain dari statement Paul P. Streeten tersebut adalah bahwa pembangunan bukan saja dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi beserta pendapatan per kapitanya, tetapi dilihat juga dari sisi keberhasilan bangsa tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan indikator kesejahteraan selain pendapatan per kapita yang meningkat adalah juga dilihat dari pemerataan pembagian pendapatan tersebut baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek dan dimensi. Bukan saja berupa

ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah, yakni antar daerah perdesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan *regional* (Dumairy, 1996: 62).

Pendapatan per kapita dan ketimpangan merupakan fungsi dari waktu. Pada tahap awal pembangunan, perbedaan laju pertumbuhan ekonomi regional yang cukup besar antar daerah telah mengakibatkan disparitas dalam distribusi pendapatan antar daerah. Namun dalam jangka panjang, ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah pun akan cenderung menurun. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata setiap daerah seiring dengan waktu yang berjalan.

Hal tersebut sejalan dengan Hipotesa Neo-Klasik yang mengatakan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan itu terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan Hipotesa Neo-Klasik ini, maka konklusi sementara adalah bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah (Sjafrizal, 2008: 105).

Menurut **Sirojuzilam** (2009) berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah, dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tidak akan bermanfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan.

Pada kenyataannya, pembangunan yang terjadi pada daerah-daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tidaklah selalu sama. Hal ini dikarenakan keanekaragaman dan perbedaan geografis hal ini tercermin dalam perbedaan kondisi sosial ekonomi yang cukup signifikan pada setiap daerah. Sementara beberapa bagian di Jawa Barat memiliki pendapatan yang sangat maju, sedangkan dibagian lain masih menunjukkan adanya kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. Selain itu perbedaan geografis ini juga mempengaruhi potensi perekonomian dimasing-masing daerah.

Dalam melihat fenomena tingkat kesenjangan atau disparitas antar wilayah sering digunakan dengan melihat indikator tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan rata-rata nilai tambahan bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah pada satu saat tertentu. Indikator PDRB per kapita ini sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikasi ketimpangan yang terjadi di wilayah Jawa Barat dapat mengacu kepada data publikasi dari BPS seperti yang tertera pada tabel 1.1.

Selain itu kinerja pembangunan masing-masing daerah dari aspek ekonomi dapat dilakukan dengan membandingkan posisi suatu kabupaten/kota terhadap Provinsinya juga dengan membandingkan antar kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.

Kemudian untuk memudahkan dalam melihat posisi kabupaten/kota terhadap provinsi Jawa Barat, PDRB disajikan dalam bentuk kuadran yang merupakan plot LPE dan PDRB Per Kapita. Tabel tersebut terdiri dari empat kuadran, Kuadran (daerah) I mengandung arti bahwa kabupaten/kota yang berada di daerah ini memiliki LPE yang lebih tinggi dan PDRB Per Kapita lebih besar dari angka provinsi. Bila diasumsikan terdapat pemerataan, maka masyarakat di kabupaten/kota yang berada di kuadran ini relatif paling sejahtera dibandingkan yang berada pada kuadran lainnya. Kuadran II menunjukkan kabupaten/kota yang memiliki PDRB Per Kapita lebih besar, namun LPE nya lebih rendah dibanding dengan angka provinsi. Masyarakat kabupaten/kota pada kuadran II relatif lebih sejahtera, namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota lainnya.

Kuadran yang menunjukkan keterbelakangan pertumbuhan ekonomi juga rendahnya tingkat kesejahteraan penduduknya dibanding daerah lainnya di Jawa Barat adalah kuadran III. Kuadran yang terakhir (IV) ditempati oleh kabupaten/kota yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih rendah dibandingkan angka provinsi, namun memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih pesat.

**Tabel 1.1**  
**Plot LPE dan PDRB Per Kapita Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2008**  
**(tanpa migas)**

<p>Bekasi, Karawang, Cirebon, Kota Cimahi, Purwakarta, Indramayu</p> <p><b>II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PDRB Per Kapita Jabar Rp. 11,73 juta</b></p>	<p><b>L</b> Kota Bandung</p> <p><b>P</b></p> <p><b>E</b></p> <p style="text-align: right;"><b>I</b></p>
<p><b>III</b></p> <p>Bogor, Bandung, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Cirebon, Kota Banjar, Majalengka, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Sukabumi, Ciami, Subang, Cianjur</p>	<p><b>J</b> <b>IV</b></p> <p><b>a</b> Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota <b>b</b> Sukabumi, Kota Depok</p> <p><b>a</b></p> <p><b>r</b></p> <p><b>6,01%</b></p>

*Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat*

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dengan tanpa memperhitungkan nilai tambah minyak dan gas bumi hanya terdapat satu kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Per Kapita diatas Jawa Barat (berada di kuadran I) yaitu Kota Bandung. Posisi pada kuaran I tersebut merupakan posisi ideal, sebab kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja perekonomian dan kemakmuran masyarakat di tiap kabupaten/kota yang bersangkutan relatif lebih makmur dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya secara makro.

Selanjutnya pada kuadran II terdapat 6 kabupaten/kota yaitu kabupaten Indramayu, Purwakarta, Kota Cimahi, Cirebon, Karawang dan Bekasi. Posisi pada kuadran ini menggambarkan tingkat kemakmuran yang sudah berada di atas rata-rata namun kinerja perekonomian pada tahun 2006 relatif rendah.

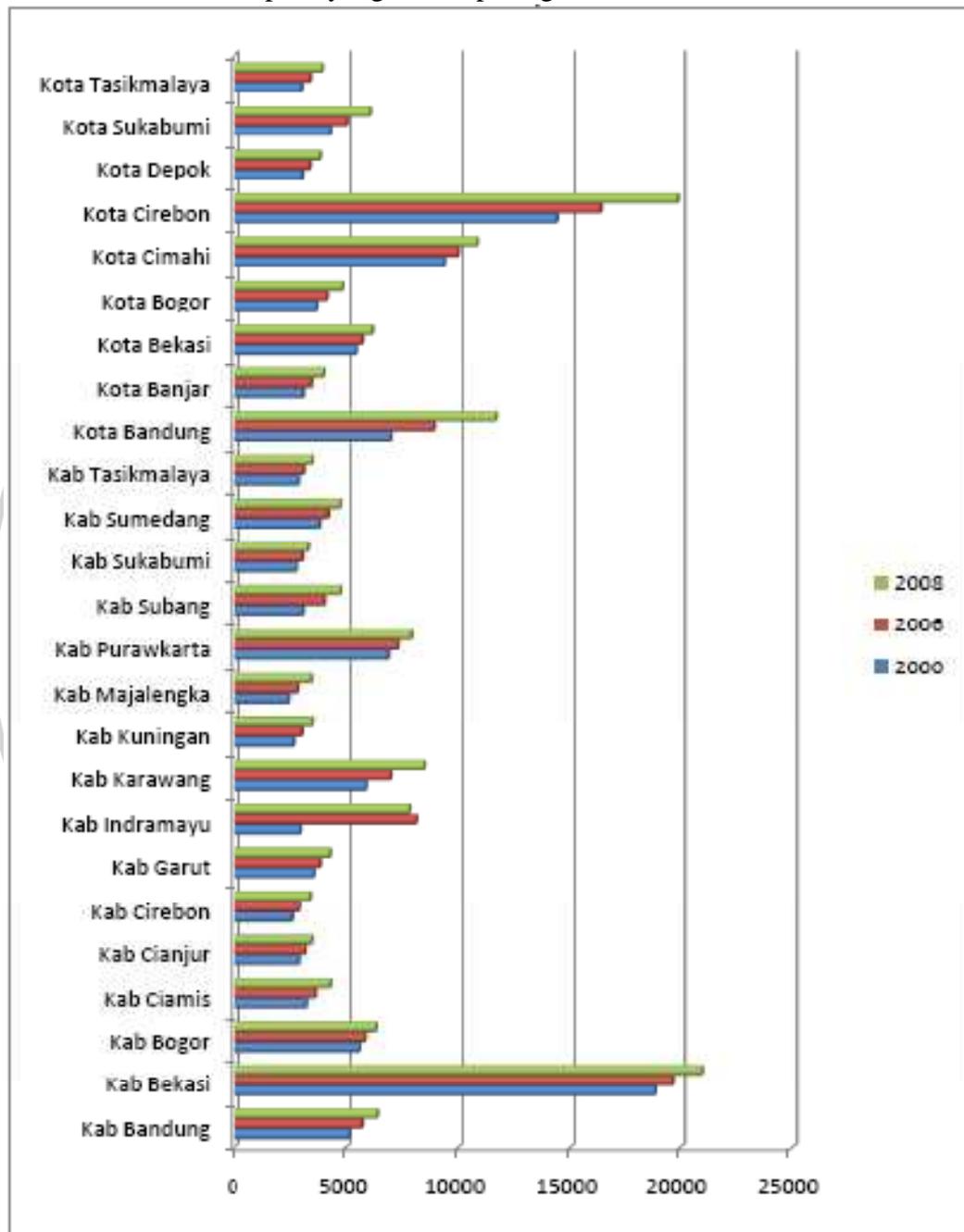
Sebaliknya kondisi pada kuadran III menunjukkan tingkat kemakmuran dan kinerja ekonomi yang relatif rendah dibanding umumnya kabupaten/kota. Daerah-daerah yang berada pada kuadran III terdapat 15 kabupaten/kota yaitu: Bogor, Bandung, Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Cirebon, Kota Banjar, Majalengka, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Sukabumi, Cimahi, Subang, Cianjur.

Dengan memperhatikan deskripsi Plot LPE dan PDRB Per Kapita pada tabel 1.1 maka jelaslah, gejala ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah menjadi nyata. Tentunya hal ini menjadikan suatu gambaran yang memerlukan tingkat kepedulian yang tinggi, terutama bagi para *stakeholder* yang ada di ditingkat propinsi dan juga di daerah kabupaten/kota. Masalah ketimpangan merupakan masalah akut yang dihadapi oleh setiap negara atau wilayah yang dapat memberikan *multiplier effect* negatif bagi proses dan hasil pembangunan yang dijalankan.

Sejalan dengan yang dikatakan Mydral (1957) (dalam **Dedi Setiadi**, 2008: 24) bahwa perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan mengakibatkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) yang dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan kesenjangan (*disparitas*) pendapatan antar daerah.

Dipandang dari prespektif lain, terutama jika mencoba mengkomparasikan perkembangan PDRB Per Kapita kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2000,

2006 dan 2008 dengan acuan atas dasar harga konstan 2000. Maka akan terlihat semakin jelas gejala ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Seperti yang tertera pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1

Grafik Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK 2000 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000, 2006 Dan 2008

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat

Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa kondisi kesejahteraan masing-masing kabupaten/kota mengalami ketimpangan. Peringkat tertinggi dalam PDRB per kapita antar kabupaten/kota selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dipegang oleh Kabupaten Bekasi, kemudian disusul oleh Kota Cirebon. Dua wilayah tersebut yang memiliki PDRB per kapita di atas PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2000-2008. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat dari PDRB per kapita antara Kabupaten Bekasi (PDRB per kapita tertinggi) dengan Kabupaten Sukabumi (PDRB per kapita terendah). Rentangan nilai perbedaannya sangat jauh antara kedua wilayah tersebut, sehingga tercermin suatu disparitas pendapatan antara daerah tertinggal (Kabupaten Sukabumi) dengan daerah maju (Kabupaten Bekasi). Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota, maka Kabupaten Bekasi yang memiliki PDRB per kapita tertinggi, memiliki laju pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi pula atau bahkan berada diatas laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat pada tahun 2008.

Selanjutnya, jika mencoba mengkomprasikan mengenai PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Barat dengan mempertimbangkan unsur dengan dan tanpa minyak dan gas bumi, maka hal ini dapat lebih memperjelas tentang realitas yang terjadi kaitannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tahun 2000 hingga tahun 2008 memotret bahwa peningkatan daya beli masyarakat terendah terjadi dikabupaten Bekasi yang hanya mengalami kenaikan sebesar 11,43 persen. Begitu pula apabila dihitung tanpa migas, daya beli

masyarakat kabupaten Bekasi hanya naik sebesar 9,96 persen. Kabupaten Indramayu tahun lalu memebukukan penurunan daya beli sebesar 5,13 persen pada PDRB dengan migas, Namun ternyata tahun 2008 kembali terjadi penurunan sebesar 3,69 persen, bila tanpa migas, daya beli kabupaten Indramayu justru naik sampai sebesar 35,58 persen. Perbedaan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 dengan migas dan tanpa migas secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK 2000 Kab/Kota di Jawa Barat**  
**tahun 2000 dan 2008**

No	Kab/Kota	Dengan migas (ribu Rp)			Tanpa migas (ribu Rp)		
		2000	2008	(%)	2000	2008	(%)
1	Kab Bandung	5217	6402	22.73	5155	4267	22.83
2	Kab Bekasi	18893	20979	11.43	18893	20701	9.96
3	Kab Bogor	5611	6351	13.19	5611	6351	13.19
4	Kab Ciamis	3236	4309	30.38	3236	4309	30.38
5	Kab Cianjur	2911	3481	19.58	2911	3481	19.58
6	Kab Cirebon	2602	3401	29.36	2602	3401	29.36
7	Kab Garut	3567	4297	20.46	3567	4297	20.46
8	Kab Indramyu	8140	7840	-3.69	2974	4032	35.58
9	Kab Krawang	5896	8486	52.83	5896	8133	46.11
10	Kab Kuningan	2662	3493	30.82	2662	3493	30.82
11	Kab Majalngka	2594	3448	32.92	2542	3377	32.83
12	Kab Purwkrta	6889	7912	14.84	6889	7912	14.84
13	Kab Subang	3276	4760	45.30	3062	4210	37.48
14	Kab Sukabumi	2833	3316	17.02	2781	3259	17.20
15	Kab Sumdang	3819	4756	24.55	3819	4756	24.55
16	Kab Tskmlaya	2895	3482	20.25	2895	3482	20.55
17	Kota Bandung	6999	11691	67.02	6999	11691	67.02
18	Kota Banjar	3098	4012	29.49	3098	4012	29.49
19	Kota Bekasi	5451	6185	13.46	5451	6185	13.46
20	Kota Bogor	3702	4867	36.79	3702	4867	36.79
21	Kota Cimahi	9397	10855	15.51	9397	10855	15.51
22	Kota Cirebon	14395	19906	36.71	14395	19906	36.71
23	Kota Depok	3052	3851	26.17	3052	3851	26.18
24	Kota Skabumi	4305	6090	41.47	4305	6090	41.47
25	Kota Tasikmlya	3019	3942	30.59	3019	3942	30.59
<b>Jawa barat</b>		<b>5484.99</b>	<b>6892.5</b>	<b>25.66</b>	<b>5177.70</b>	<b>6691.58</b>	<b>29.24</b>

*Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat*

Memasuki tahun 2008 tampak bahwa level PDRB per kapita semua kabupaten/kota di atas Rp. 5 juta. Pergeseran level PDRB per kapita dari tahun 2000 ke tahun 2008 ke level yang lebih tinggi terjadi di seluruh kota/kabupaten. Pada tahun 2000 masih terdapat 7 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita di bawah Rp 3 juta, terdapat 9 kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita pada level Rp 3 juta sampai Rp 3.99 juta. Pada level Rp 4 – 4.99 juta hanya terdapat satu kota. Sedangkan pada level di atas Rp 5 juta terdapat 9 kabupaten/kota.

Dalam lingkup *region* ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Disamping itu, kurang lancarnya arus barang dan faktor produksi antar wilayah turut memicu terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Maka akibat dari perbedaan ini, kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda-beda.

Provinsi Jawa Barat yang merupakan entitas dari satu negara yang bernama Indonesia tak luput dari ancaman yang berlabel ketimpangan ini. Padahal eksistensi Jawa Barat didalamnya memiliki peran dan potensi yang besar dalam menopang perkembangan pembangunan nasional. Luas wilayah, kandungan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang paling banyak bisa memberikan kontribusi dalam proses akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tapi kenyataan memang bicara lain, sejumlah fakta dan laporan yang memberikan gambaran

betapa masih cukup banyak kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Masalah ketimpangan yang terjadi di Jawa Barat secara empiris dapat diukur dengan suatu ukuran baku, salah satunya dengan menggunakan parameter Indeks Williamson (Sjafrizal, 2008: 108), yakni analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional (*regional inequality*). Berikut Penulis sajikan Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat periode 1986-2009.

**Tabel 1.3**

**Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Periode 1986-2009**

Tahun	Indeks Williamson	Tahun	Indeks Williamson
1986	0.73490416	1998	0.52906836
1987	0.77129542	1999	0.59332265
1988	0.72466441	2000	0.68048659
1989	0.71066394	2001	0.64612624
1990	0.69122789	2002	0.66036929
1991	0.56350051	2003	0.63370579
1992	0.56386496	2004	0.64001861
1993	0.58991974	2005	0.62062515
1994	0.45398881	2006	0.64463702
1995	0.46908439	2007	0.63998812
1996	0.52951728	2008	0.65945427
1997	0.57013154	2009	0.64876255
		<b>Rata-Rata</b>	<b>0.62426319</b>

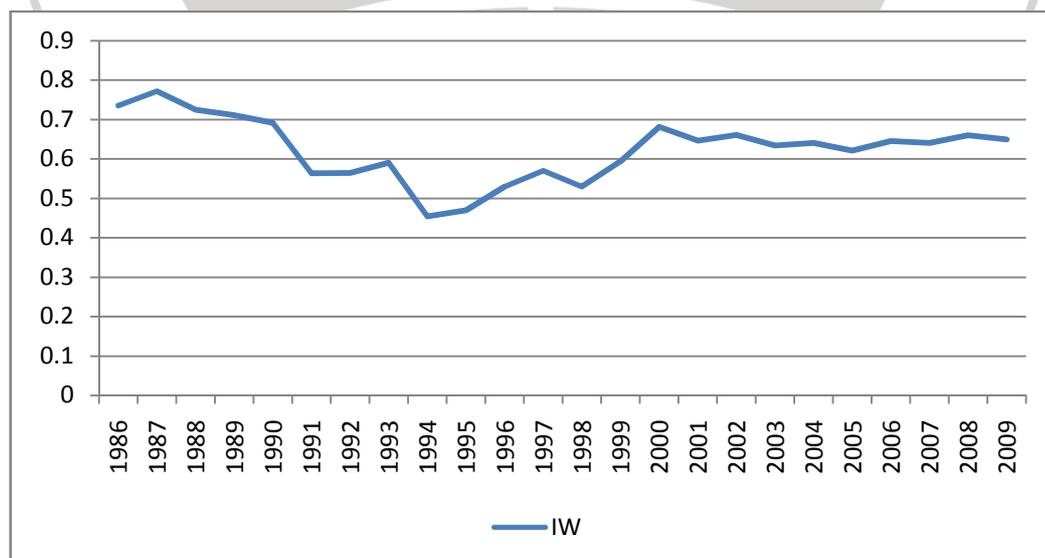
Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (data diolah)

Tabel 1.3 di atas memberikan suatu gambaran cukup jelas bahwa Tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang dihitung menggunakan Indeks Ketimpangan Williamson selama dua puluh lima tahun pengamatan sebesar 0.62426319. Hal ini berarti bahwa di Jawa Barat telah terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota pada tingkat level tinggi, hal

ini ditunjukkan dengan besarnya Indeks Williamson yang rata-rata di atas 0,5. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Jawa Barat Secara cukup serius dan dikhawatirkan berimbas pada proses pembangunan yang tengah dijalankan.

Ketimpangan yang terjadi pada periode 1986-1995 memberikan sebuah gambaran adanya suatu perbaikan, ini ditandai dengan tren yang menurun ketika menginjak kepada tahun 90-an. Dimana pada tahun 1986 sampai 1987 indeks Williamson mengalami kenaikan sebesar 0.77129542 kemudian mengalami penurunan pada tahun berikutnya sampai tahun 1995.

Pada periode 1996-2009 angka indeks masih begitu tinggi, di atas 0.5. pada periode ini ketimpangan antar wilayah terendah terjadi pada tahun 1996 sebesar 0.52951728 kemudian angka indeks tertinggi terjadi pada tahun 2000 sebesar 0.68048659. Pada tahun berikutnya angka indeks berfluktuatif pada kisaran 0.6.



Gambar 1.2  
Grafik Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Periode 1986-2009

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan adalah investasi. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar yang menerangkan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah, sehingga dapat memicu ketimpangan pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Tulus Tambunan, 2003: 178).

Menurut **Tulus Tambunan** (2003: 275), faktor-faktor penyebab disparitas antar daerah di Indonesia antara lain adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah, perbedaan sumber daya alam (SDA), perbedaan kondisi geografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan tofik yang perlu dikaji dengan memperhitungkan beberapa alasan. Dasar utama menariknya hal ini untuk diteliti karena ketimpangan merupakan suatu hal yang dapat menghambat pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Masalah periode penelitian yang menjadi fokus Penulis adalah mengambil rentang periode pada tahun 1986-2009. Hal ini yang menjadikan pertimbangan Penulis dimana pada periode tersebut baik dalam level nasional maupun regional terdapat beberapa peristiwa yang cukup menarik baik ditinjau dalam prespektif ekonomi ataupun politik.

Proses perkembangan ini memberikan warna dalam dinamisnya suatu perkembangan bangsa, dalam hal ini Indonesia. Dalam prespektif politik misalnya, Indonesia pernah mengalami masa-masa periode kepemimpinan dengan label orde, ada orde lama, orde baru dan orde reformasi. Pun begitu dalam hal sudut pandang ekonomi, dinamika perekonomian nasional yang memberikan imbas terhadap perekonomian daerah banyak terjadi dalam kurun periode tersebut. Maka dari itu isu ketimpangan distribusi pendapatan baik pendapatan dalam prespektif perorangan ataupun antar daerah akan memberikan suatu gambaran yang cukup jelas mengenai penentuan dalam mengisi pembangunan dengan ragam kebijakan-kebijakannya.

Maka berangkat dari paparan yang telah dikemukakan oleh Penulis di atas, Penulis mengajukan judul penelitian: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 1986-2009”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka lingkup permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

4. Bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- 4 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1 Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- 2 Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah ketimpangan distribusi pendapatan.
- 3 Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai ketimpangan distribusi pendapatan.